



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id / disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/ 491 / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER BATU MANDIRI GAMPONG SUMBER BATU
KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dikeluarkan izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor 06 Tahun 2013
b. Rekomendasi Pengawas Binaan : UPTD Pendidikan Wil I Nomor : 421.2/18/2018
c. Permohonan Ketua Yayasan TK Paya Peunaga : 01/ YAPENSUBARI/2018 Tanggal 24 JULI 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :
➤ TAMAN KANAK-KANAK (TK) CEMPAKA MANDIRI
YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER BATU MANDIRI GAMPONG SUMBER BATU KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Juli 2018 s/d 07 Juli 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 06 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

BISMI, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 198510 1 001

Terbaca :

1. Bupati Aceh Barat;
2. Pimpinan DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Meureubo;
5. Geuchik Gampong Paya Peunaga;
6. Kepala Sekretariat MPD;
7. Arsip.